

SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

No.Reg. 2/PK-V/VI/2023

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

(Angga Fikri Alhusen, 1810112240, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Tata Negara(PK V), 60 Halaman, Tahun
2023)

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi utama dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peran OJK sangat penting dalam menangani kasus investasi ilegal yang semakin berkembang di negara ini. Peningkatan kasus penipuan investasi ilegal terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan tinggi. Baik masyarakat yang teredukasi maupun yang tidak teredukasi bisa menjadi korban dari penipuan investasi ilegal. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini *Pertama*, Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan investasi di Indonesia? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap investasi ilegal di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang meneliti bahan Pustaka yang merupakan data skunder, Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, artikel serta perkembangan kasus yang terkait dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan *Pertama*, OJK memiliki wewenang untuk mengatasi investasi ilegal dengan tindakan-tindakan seperti mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menangani kasus yang lebih kompleks. OJK mengeluarkan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal penanggulangan investasi ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah investasi ilegal. *Kedua*, Negara Indonesia berupaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat dalam menghadapi investasi ilegal, baik melalui tindakan preventif maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.